

Kesenjangan Konversi Pertumbuhan menjadi Kesejahteraan di Indonesia: Refleksi Menjelang 81 Tahun Kemerdekaan dan Implikasi bagi Pengembangan Ekonomi Syariah

Agung Mulyana

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Fithrah Insani, Bandung Barat, Indonesia

Alamat email: agungmulyana@steifitrahinsani.ac.id

Diserahkan tanggal 08 Maret 2026 | Diterima tanggal 27 April 2026 | Diterbitkan tanggal 21 Mei 2026

Abstract:

Approaching the 81st anniversary of independence, Indonesia's expanding economic capacity needs to be assessed by its ability to generate broadly shared welfare. This study provides a historical-comparative assessment of welfare change and develops a descriptive Welfare Conversion Gap diagnostic, defined as a condition in which output growth is not fully transmitted into poverty reduction, narrower inequality, stronger human capabilities, and wider productive participation. The study uses secondary data from Statistics Indonesia (BPS), the Financial Services Authority (OJK), the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Indonesian Waqf Board, BAZNAS, and academic literature. Quantitative series are used only when methodologically comparable: 1945–1965 is treated as historical context, while quantitative benchmarks use official poverty data since 1976, modern human-development series, and contemporary indicators through August 2026. The findings show substantial long-run progress in poverty reduction and human development, yet welfare conversion remains incomplete. Poverty declined to 8.07% in March 2026, while the Gini ratio rose from 0.363 in September 2025 to 0.368; the rural–urban poverty gap remained 4.33 percentage points. MSMEs remain the backbone of the people's economy, but Sharia financial inclusion was only 13.41%. The study proposes a Welfare Conversion Gap Diagnostic and an Islamic People's Economy Welfare Framework (IPEWF) integrating human capability, productive people's economy, Islamic commercial finance, and Islamic social finance. The framework is conceptual-diagnostic rather than an empirically estimated causal model.

Keywords: Welfare; People's Economy; Welfare Conversion Gap; Islamic Economy; MSMEs; Islamic Social Finance.

Abstrak :

Menjelang 81 tahun kemerdekaan, peningkatan kapasitas ekonomi Indonesia perlu dievaluasi berdasarkan kemampuannya menghasilkan kesejahteraan yang merata. Penelitian ini menganalisis perubahan kesejahteraan Indonesia secara historis-komparatif dan menguji secara deskriptif adanya kesenjangan konversi pertumbuhan (welfare conversion gap), yaitu kondisi ketika kenaikan output belum sepenuhnya ditransmisikan menjadi penurunan kemiskinan, penyempitan ketimpangan, perbaikan kapabilitas, dan perluasan partisipasi ekonomi produktif. Penelitian menggunakan data sekunder Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Wakaf Indonesia, BAZNAS, dan literatur akademik. Seri kuantitatif digunakan sesuai ketersediaan dan keterbandingan metodologis; periode 1945–1965 dibaca secara historis, sedangkan evaluasi kuantitatif menggunakan benchmark kemiskinan sejak 1976, pembangunan manusia pada seri modern, dan indikator kontemporer hingga Agustus 2026. Hasil menunjukkan kemajuan jangka panjang yang nyata pada kemiskinan dan pembangunan manusia, tetapi konversi kesejahteraan belum lengkap. Pada Maret 2026 kemiskinan turun menjadi 8,07%, sementara Gini ratio meningkat dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368; kesenjangan kemiskinan perdesaan-perkotaan masih 4,33 poin persentase. UMKM tetap menjadi basis ekonomi rakyat, tetapi inklusi keuangan syariah baru 13,41%. Penelitian mengusulkan Welfare Conversion Gap Diagnostic dan Islamic People's Economy Welfare Framework (IPEWF) sebagai kerangka integrasi kapabilitas manusia, ekonomi produktif rakyat, keuangan komersial syariah, dan Islamic social finance. Kerangka ini bersifat konseptual-diagnostik dan tidak diklaim sebagai model kausal yang telah diuji.

Kata Kunci: Kesejahteraan; Ekonomi Kerakyatan; Welfare Conversion Gap; Ekonomi Syariah; UMKM; Islamic Social Finance

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 meletakkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai tujuan konstitusional pembangunan. Menjelang peringatan 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026, evaluasi pembangunan karena itu tidak cukup berhenti pada seberapa besar Produk Domestik Bruto (PDB) telah bertambah. Pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana pertumbuhan tersebut berubah menjadi kesempatan kerja produktif, penurunan kemiskinan, distribusi yang lebih adil, peningkatan pendidikan dan kesehatan, serta perluasan kemampuan masyarakat untuk menjadi pelaku ekonomi. Kerangka ini sejalan dengan pandangan pembangunan multidimensional yang menempatkan pertumbuhan sebagai sarana, bukan tujuan akhir (Sen, 1999; Todaro & Smith, 2020).

Secara agregat, kapasitas ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025 dan kembali tumbuh 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026; secara kumulatif semester I-2026 tumbuh 5,45% (Badan Pusat Statistik [BPS], 2026a, 2026b). Pada 2025, PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta. Pencapaian tersebut penting karena menyediakan basis fiskal, pendapatan, investasi, dan kesempatan kerja yang lebih luas. Akan tetapi, ukuran agregat tidak menjelaskan bagaimana manfaat pertumbuhan tersebar di antara kelompok pendapatan, wilayah, dan sektor usaha.

Indikator kemiskinan memperlihatkan kemajuan sekaligus tantangan distribusi. BPS mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07% pada Maret 2026 atau 22,93 juta orang, lebih rendah 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025. Namun kemiskinan perdesaan masih sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan 6,34%, sehingga terdapat kesenjangan 4,33 poin persentase (BPS, 2026f). Ketimpangan juga tidak bergerak satu arah dengan kemiskinan. Gini ratio turun menjadi 0,363 pada September 2025, tetapi naik kembali menjadi 0,368 pada Maret 2026 (BPS, 2026c, 2026d). Konfigurasi ini menunjukkan bahwa ekonomi dapat tumbuh, kemiskinan menurun, tetapi distribusi pengeluaran tetap mengalami tekanan pada periode yang sama.

Perkembangan pembangunan manusia memberikan dimensi lain. IPM Indonesia mencapai 75,90 pada 2025, meningkat dari 75,02 pada 2024 dan 71,92 pada 2019. Umur harapan hidup mencapai 74,47 tahun, harapan lama sekolah 13,30 tahun, rata-rata lama sekolah 9,07 tahun, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Rp12,802 juta per tahun (BPS, 2026e). Kenaikan ini menunjukkan perluasan kapabilitas, tetapi tidak menghapus persoalan kualitas pekerjaan dan partisipasi produktif. Pada Februari 2026 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%; sebanyak 147,67 juta orang bekerja, tetapi sekitar 28,78% pekerja masih berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang produktivitasnya sangat beragam (BPS, 2026h).

Literatur mengenai hubungan pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan di Indonesia sudah lama menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ditentukan oleh distribusinya. Balisacan et al. (2003) menunjukkan melalui data subnasional bahwa pertumbuhan memang berperan dalam pengurangan kemiskinan, tetapi perbedaan kondisi lokal dan ketimpangan memengaruhi besarnya dampak. Miranti (2010) menegaskan bahwa perubahan kemiskinan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pertumbuhan dan ketimpangan. De Silva dan Sumarto (2014) serta Miranti et al. (2014) kembali menunjukkan bahwa pro-poor growth bergantung pada bagaimana pertumbuhan konsumsi dan distribusi bekerja secara bersamaan. Hill (2020, 2021) menunjukkan perbaikan besar standar hidup Indonesia selama beberapa dekade, tetapi juga mengingatkan adanya dimensi ketimpangan dan kerentanan yang tidak hilang hanya karena rata-rata pendapatan meningkat.

Dalam penelitian ini, hubungan yang tidak sempurna antara pertumbuhan dan outcome sosial disebut welfare conversion gap atau kesenjangan konversi pertumbuhan menjadi kesejahteraan. Konsep ini tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa pertumbuhan gagal atau tidak berguna. Sebaliknya, konsep tersebut digunakan untuk mengidentifikasi di mana mekanisme transmisi pertumbuhan bekerja kuat, bekerja sebagian, atau masih lemah. Jika PDB tumbuh dan kemiskinan menurun, terdapat konversi positif. Jika pada saat yang sama ketimpangan membesar, kesenjangan perdesaan-perkotaan tetap tinggi, atau akses pembiayaan produktif belum luas, berarti konversinya belum lengkap. Dengan demikian, fokus analisis berpindah dari “apakah ekonomi tumbuh?” menuju “melalui kanal apa pertumbuhan berubah menjadi kapabilitas dan kesejahteraan?”.

Ekonomi kerakyatan relevan sebagai salah satu kanal transmisi tersebut. Pasal 33 UUD 1945 menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan menegaskan demokrasi ekonomi. Dalam praktik kontemporer, ekonomi rakyat tercermin terutama pada UMKM, koperasi, pertanian rakyat, usaha kreatif, dan berbagai usaha produktif berbasis rumah tangga. Pemerintah mencatat lebih dari 64 juta unit UMKM, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan penyerapan hampir 97% tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Besarnya skala ini berarti kualitas pertumbuhan nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan usaha rakyat naik produktivitas, memperoleh teknologi, terhubung dengan pasar, dan mengakses pembiayaan.

Namun besarnya jumlah UMKM tidak otomatis menunjukkan tingginya produktivitas atau kualitas kesejahteraan. Banyak usaha mikro berfungsi sebagai strategi bertahan hidup, memiliki modal tipis, tidak memiliki pemisahan keuangan usaha-rumah tangga, dan menghadapi keterbatasan skala. Karena itu, kebijakan ekonomi kerakyatan yang hanya menghitung jumlah unit usaha dapat menghasilkan ilusi partisipasi. Ekonomi kerakyatan perlu diukur melalui produktivitas, akses modal, kualitas pekerjaan, formalitas, inovasi, kepemilikan aset, dan kemampuan masuk ke rantai nilai. Dalam perspektif kapabilitas, masyarakat disebut berdaya bukan semata karena “memiliki usaha”, melainkan karena mempunyai pilihan produktif dan kemampuan meningkatkan kehidupan melalui usaha tersebut (Sen, 1999).

Ekonomi syariah menyediakan instrumen yang berpotensi memperkuat kanal tersebut. Per Maret 2026 aset perbankan syariah mencapai Rp1.061,61 triliun, pembiayaan Rp716,40 triliun, dan pembiayaan UMKM Rp217,86 triliun atau sekitar 30,4% dari total pembiayaan perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2026). Di satu sisi, angka tersebut menunjukkan keterhubungan nyata antara industri syariah dan sektor riil. Di sisi lain, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 menunjukkan inklusi keuangan syariah baru 13,41%, jauh di bawah inklusi keuangan umum sebesar 80,51%; literasi syariah 43,42% juga lebih rendah daripada literasi umum 66,46% (OJK & BPS, 2025). Artinya, pertumbuhan institusi syariah belum identik dengan penggunaan produk syariah oleh masyarakat secara luas.

Selain pembiayaan komersial, Islamic social finance menawarkan kanal redistribusi dan pembentukan aset. Data Badan Wakaf Indonesia menunjukkan akumulasi wakaf uang meningkat dari sekitar Rp819 miliar pada 2020 menjadi Rp3,015 triliun pada 2025, setara pertumbuhan majemuk sekitar 29,8% per tahun selama lima tahun. Namun pemanfaatan tanah wakaf untuk kegiatan ekonomi baru sekitar 4,8%, jauh di bawah penggunaan untuk masjid/musala dan pendidikan (Badan Wakaf Indonesia [BWI], 2026). BAZNAS melaporkan bahwa pengelolaan zakat secara nasional pada 2025, berdasarkan pengukuran internal Kaji Dampak Zakat, membantu 302.994 jiwa keluar dari garis kemiskinan, termasuk 113.134 jiwa dari kategori miskin ekstrem (BAZNAS, 2026). Angka dampak tersebut perlu dipahami sebagai estimasi institusional BAZNAS, bukan sebagai bukti kausal makro yang menggantikan statistik kemiskinan BPS.

Kajian ekonomi Islam telah mengembangkan ukuran kesejahteraan yang lebih luas daripada pendapatan. Chapra (2008) menempatkan pembangunan dalam kerangka maqashid al-shariah, sedangkan Dusuki dan Abdullah (2007) menekankan hubungan antara masalah,

tanggung jawab sosial, dan tujuan syariah. Beik dan Arsyianti (2015) menawarkan CIBEST sebagai pengukuran kemiskinan dan kesejahteraan yang memasukkan dimensi material serta spiritual. Pada level institusi keuangan, Mergaliyev et al. (2021) menunjukkan perlunya mengukur tujuan etis bank Islam dengan kerangka maqashid. Penelitian terbaru Hapsari et al. (2026) juga menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat diteliti secara empiris dari sisi kesejahteraan usaha mikro, sehingga hubungan Islamic social finance dan pemberdayaan seharusnya bergerak dari klaim normatif menuju evaluasi outcome.

State of the art tersebut memperlihatkan tiga kelompok kajian yang belum sepenuhnya terhubung. Literatur pembangunan Indonesia banyak menganalisis pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan manusia; literatur ekonomi rakyat berfokus pada UMKM serta pemberdayaan; sedangkan literatur ekonomi syariah banyak memeriksa industri keuangan, zakat, wakaf, dan maqashid sebagai ranah tersendiri. Kesenjangan penelitian terletak pada kebutuhan untuk membaca ketiga ranah sebagai satu arsitektur transmisi kesejahteraan: pertumbuhan menyediakan kapasitas, ekonomi rakyat menyediakan kanal partisipasi produktif, sementara keuangan syariah dan Islamic social finance dapat menyediakan pembiayaan, redistribusi, serta pembentukan aset sosial.

Kebaruan penelitian ini terdiri atas dua perangkat konseptual. Pertama, *Welfare Conversion Gap Diagnostic* (WCG-D), yaitu dashboard diagnostik multidimensi yang membaca transmisi pertumbuhan melalui lima kanal: penurunan kemiskinan, distribusi/spasial, ketenagakerjaan, pembangunan kapabilitas, dan partisipasi produktif/akses keuangan. WCG-D tidak dijumlahkan menjadi satu indeks dan tidak menggunakan bobot arbitrer; hasilnya dibaca sebagai kuat, parsial, atau lemah berdasarkan arah indikator dan titik balik. Kedua, Islamic People's Economy Welfare Framework (IPEWF), yaitu kerangka ekosistem yang menghubungkan kapabilitas manusia, ekonomi produktif rakyat, keuangan komersial syariah, Islamic social finance, akses pasar, dan kebijakan publik menuju falah serta masalah. Istilah framework dipilih secara sadar karena hubungan antarkomponen belum diuji sebagai model kausal.

Penelitian ini bertujuan (1) mengevaluasi perubahan kesejahteraan Indonesia melalui benchmark historis dan indikator kontemporer hingga Agustus 2026; (2) mendiagnosis welfare conversion gap antara pertumbuhan dan kesejahteraan; (3) menganalisis ekonomi kerakyatan sebagai kanal partisipasi produktif; serta (4) merumuskan implikasi bagi pengembangan ekonomi syariah melalui IPEWF. Dengan fokus tersebut, penelitian tidak mengklaim menyediakan seri statistik homogen untuk seluruh periode 1945–2026, melainkan menggabungkan pembacaan historis dengan seri kuantitatif yang digunakan sesuai batas keterbandingan metodologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif sekunder dengan analisis historis-komparatif dan sintesis konseptual. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengestimasi pengaruh kausal satu variabel terhadap variabel lain, melainkan membaca perubahan jangka panjang, titik balik, dan koherensi arah antarindikator kesejahteraan. Analisis statistik yang digunakan berupa perbandingan level, perubahan poin persentase, laju pertumbuhan, rasio sederhana, dan *compound annual growth rate* (CAGR) ketika seri data memadai. Tidak digunakan regresi atau uji kausalitas; karena itu istilah “hubungan” dalam artikel dibatasi pada ko-movemen deskriptif dan mekanisme yang didukung literatur.

Cakupan historis dimulai dari 1945 hingga Agustus 2026, tetapi tidak seluruh periode diperlakukan sebagai seri numerik yang homogen. Periode 1945–1965 digunakan sebagai konteks pembentukan ekonomi nasional dan keterbatasan kapasitas statistik. Benchmark kemiskinan nasional menggunakan seri resmi BPS sejak 1976. Seri kemiskinan sebelum dan sesudah penyempurnaan standar Desember 1998 diberi tanda *methodological break* dan tidak dibandingkan secara mekanis. IPM menggunakan seri metode modern yang tersedia secara konsisten pada periode yang lebih baru. Data perbankan syariah, literasi/inklusi syariah, zakat,

dan wakaf digunakan terutama untuk 2020–2026 karena ketersediaan sistem statistik dan institusinya relatif lebih baru.

Untuk menjaga keterbacaan sejarah, periode dibagi menjadi enam fase: 1945–1965 (pembentukan ekonomi dan instabilitas), 1966–1997 (transformasi struktural dan penurunan kemiskinan), 1998–2004 (krisis dan pemulihan), 2005–2019 (konsolidasi pertumbuhan dan pembangunan manusia), 2020–2022 (guncangan pandemi dan pemulihan awal), dan 2023–Agustus 2026 (normalisasi pertumbuhan dan penguatan ekosistem keuangan syariah). Periodisasi ini bukan pembagian kausal yang kaku, melainkan alat analisis untuk menempatkan indikator dalam konteks kebijakan dan guncangan ekonomi yang berbeda.

Sumber data primer-statistik adalah BPS untuk pertumbuhan PDB, kemiskinan, Gini ratio, ketenagakerjaan, dan IPM; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk profil kontribusi UMKM; OJK dan BPS untuk literasi serta inklusi keuangan; OJK untuk kinerja perbankan syariah dan pembiayaan UMKM; BWI untuk statistik wakaf; serta BAZNAS untuk laporan dampak zakat. Literatur ilmiah digunakan untuk menginterpretasikan pertumbuhan pro-poor, perubahan ketimpangan, kapabilitas, maqashid, dan instrumen Islamic social finance. Data institusional yang merupakan hasil pengukuran internal lembaga—seperti estimasi dampak zakat—diberi label sumber agar tidak diperlakukan setara dengan statistik resmi BPS.

Tabel 1. Cakupan Data dan Batas Keterbandingan

Dimensi	Indikator	Periode yang digunakan	Catatan keterbandingan
Pertumbuhan	PDB riil / pertumbuhan	Historis-kontekstual; 2019–2026 untuk benchmark kontemporer	Perubahan tahun dasar dan struktur ekonomi diperhatikan
Kemiskinan	P0 / jumlah miskin	1976–2026	Break metodologi sejak Desember 1998
Distribusi	Gini ratio	Seri modern; fokus 2019–2026	Dibaca bersama kemiskinan, bukan tunggal
Ketenagakerjaan	TPT & struktur pekerjaan	Fokus 2019–2026	Frekuensi Sakernas berbeda menurut periode
Kapabilitas	IPM dan komponen	Seri modern; benchmark 2019–2025	Menggunakan metode BPS terbaru
Ekonomi rakyat	UMKM, kontribusi PDB & tenaga kerja	Data terkini pemerintah	Bukan seri tahunan homogen
Ekonomi syariah	Aset/pembiayaan, UMKM, literasi/inklusi	2025–2026	Mencerminkan ekosistem finansial modern
Islamic social finance	Wakaf uang & dampak zakat	2020–2026	BAZNAS impact estimate dibedakan dari statistik BPS

Variabel kesejahteraan dikelompokkan dalam lima dimensi WCG-D. Dimensi pertama, poverty transmission, menggunakan tingkat kemiskinan dan perubahan jumlah penduduk miskin. Dimensi kedua, distribution and spatial equity, menggunakan Gini ratio serta kesenjangan kemiskinan perdesaan-perkotaan. Dimensi ketiga, employment conversion, menggunakan tingkat pengangguran terbuka dan struktur lapangan kerja. Dimensi keempat, human capability, menggunakan IPM dan komponennya. Dimensi kelima, productive participation and access, menggunakan skala UMKM, pembiayaan UMKM syariah, serta literasi dan inklusi keuangan syariah. Setiap dimensi diberi diagnosis “kuat”, “parsial”, atau “lemah” berdasarkan kombinasi arah indikator, bukan berdasarkan cut-off statistik universal.

Ekonomi kerakyatan tidak diperlakukan sebagai variabel tunggal. Untuk menghindari reduksi konsep, penelitian menggunakan proksi partisipasi produktif berupa jumlah dan kontribusi UMKM, penyerapan tenaga kerja, serta akses pembiayaan. Ekonomi syariah juga tidak

didefinisikan sebagai satu ukuran pertumbuhan. Istilah “pengembangan ekonomi syariah” digunakan untuk menggambarkan perluasan aset dan pembiayaan perbankan syariah, pembiayaan UMKM, inklusi pengguna, serta mobilisasi zakat dan wakaf. Perubahan istilah dari “pertumbuhan ekonomi syariah” pada naskah awal menjadi “pengembangan ekonomi syariah” dilakukan agar klaim sesuai dengan indikator yang benar-benar tersedia.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, menyusun benchmark historis dan menandai keterbatasan komparabilitas. Kedua, membangun dashboard kesejahteraan kontemporer dari indikator 2019–2026. Ketiga, menyusun WCG-D untuk mengidentifikasi kanal konversi yang kuat atau masih parsial. Keempat, mensintesis temuan dengan prinsip ekonomi kerakyatan dan ekonomi Islam untuk membentuk IPEWF. Kerangka terakhir tidak diestimasi secara ekonometrik; ia disajikan sebagai proposisi konseptual yang dapat diuji pada penelitian lanjutan.

Keterbatasan metodologis utama adalah perbedaan definisi dan frekuensi indikator sepanjang delapan dekade. Kemiskinan BPS mengalami penyempurnaan metodologi, IPM memiliki perubahan metode, dan data keuangan syariah modern tidak tersedia sejak awal kemerdekaan. Karena itu, penelitian menghindari menghubungkan dua titik yang tidak comparable sebagai satu tren mulus. Pendekatan benchmark dipilih untuk mempertahankan nilai historis tanpa menciptakan presisi palsu. Semua angka kontemporer menggunakan publikasi resmi terbaru yang tersedia sampai 16 Agustus 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

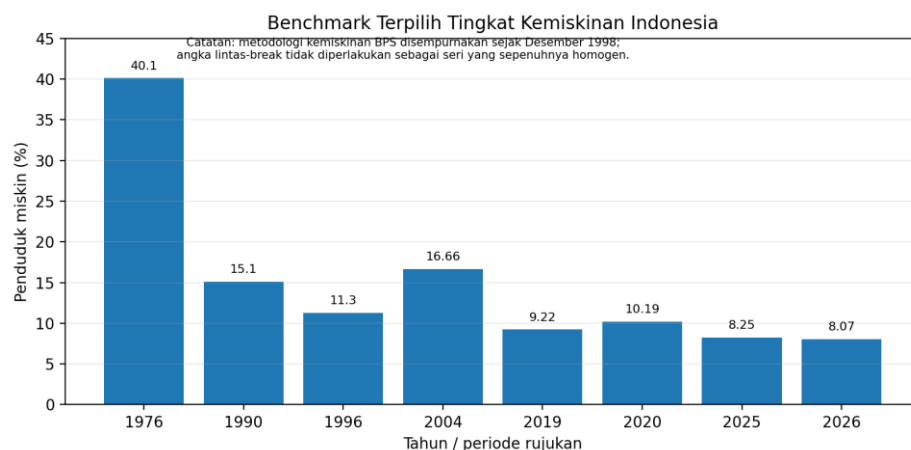
Hasil

Tabel 2. Periodisasi Analitis dan Benchmark Kesejahteraan

Fase	Karakter utama	Indikasi kesejahteraan / titik balik
1945–1965	Pembentukan negara, instabilitas fiskal/moneter, kapasitas produksi terbatas	Belum tersedia seri kesejahteraan nasional yang sebanding dengan statistik modern
1966–1997	Stabilisasi, pembangunan infrastruktur, transformasi struktural	Kemiskinan resmi turun dari 40,1% (1976) menjadi 11,3% (1996; metodologi saat itu)
1998–2004	Krisis Asia dan pemulihan	Kemiskinan melonjak; BPS menyempurnakan standar sejak Desember 1998; 2004 tercatat 16,66%
2005–2019	Konsolidasi pertumbuhan dan ekspansi layanan sosial	Kemiskinan Sep 2019 9,22%; IPM 2019 71,92
2020–2022	Pandemi dan pemulihan	Kemiskinan Sep 2020 10,19%; menunjukkan kerentanan outcome sosial terhadap guncangan
2023–Ags 2026	Normalisasi pertumbuhan dan transformasi digital/keuangan	Poverty Mar 2026 8,07%; IPM 2025 75,90; Gini Mar 2026 0,368

Hasil periodisasi menunjukkan bahwa kemajuan kesejahteraan Indonesia tidak terjadi secara linear. Pada fase 1945–1965, persoalan utama adalah pembentukan institusi ekonomi dan stabilitas; data kesejahteraan modern belum tersedia secara memadai. Fase 1966–1997 menunjukkan transformasi besar. Seri BPS mencatat tingkat kemiskinan nasional sekitar 40,1% pada 1976 dan 11,3% pada 1996 menggunakan standar yang berlaku pada periodenya, penurunan 28,8 poin persentase. Temuan jangka panjang ini konsisten dengan kajian Hill (2020, 2021) yang menunjukkan peningkatan besar standar hidup Indonesia sepanjang beberapa dekade.

Krisis Asia menjadi titik balik. BPS memperbarui standar pengukuran kemiskinan sejak Desember 1998, sehingga angka sebelum dan sesudah perubahan tidak boleh diperlakukan seolah-olah sepenuhnya homogen. Dengan standar modern pascakrisis, tingkat kemiskinan nasional pada 2004 tercatat 16,66%. Setelah itu tren menurun kembali dan mencapai 9,22% pada September 2019 (BPS, 2018, 2020). Pandemi COVID-19 membalikkan sebagian kemajuan tersebut: kemiskinan September 2020 meningkat menjadi 10,19%. Pola ini menunjukkan bahwa outcome kesejahteraan mempunyai sensitivitas terhadap guncangan meskipun ekonomi telah mengalami transformasi struktural.



Gambar 1. Benchmark Terpilih Tingkat Kemiskinan Indonesia

Sumber: BPS (2018, 2020, 2021, 2026f, 2026g), diolah. Catatan: benchmark 1976–1996 menggunakan standar pada periodenya; standar kemiskinan disempurnakan sejak Desember 1998 sehingga grafik tidak dibaca sebagai satu seri homogen tanpa *break*.

Periode 2023–Agustus 2026 menunjukkan pemulihan yang kuat. Ekonomi tumbuh 5,11% pada 2025, 5,61% pada triwulan I-2026, dan 5,29% pada triwulan II-2026. Kemiskinan turun dari 8,25% pada September 2025 menjadi 8,07% pada Maret 2026. Pada horizon ini terdapat sinyal konversi positif dari aktivitas ekonomi ke pengurangan kemiskinan, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan kausalitas karena outcome kemiskinan juga dipengaruhi inflasi, transfer sosial, upah, struktur rumah tangga, dan kebijakan lainnya.

Indikator distribusi memperlihatkan pola yang lebih kompleks. Gini ratio turun dari 0,381 pada September 2024 menjadi 0,363 pada September 2025, lalu meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Sementara itu, kemiskinan terus menurun. Artinya, sebuah periode dapat menunjukkan pengurangan kemiskinan bersamaan dengan sedikit peningkatan ketimpangan pengeluaran. Ini merupakan contoh empiris dari welfare conversion gap parsial: lantai kesejahteraan membaik, tetapi distribusi tambahan manfaat tidak selalu bergerak ke arah yang sama.

Dimensi spasial juga menegaskan kesenjangan konversi. Pada Maret 2026, kemiskinan perdesaan 10,67% dan perkotaan 6,34%. Gap 4,33 poin persentase menunjukkan bahwa lokasi masih memengaruhi peluang rumah tangga keluar dari kemiskinan. Kesenjangan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui perbedaan pendapatan; struktur pekerjaan, akses infrastruktur, kualitas pendidikan, jarak ke pasar, kepemilikan aset, dan produktivitas pertanian ikut menentukan. Karena itu, ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk kesejahteraan harus memiliki strategi spasial, bukan sekadar program nasional seragam.

Pasar kerja menunjukkan kemajuan kuantitatif yang penting. Pada Februari 2026, TPT 4,68%, turun 0,08 poin persentase dibanding Februari 2025, dengan 147,67 juta penduduk bekerja. Namun sekitar 42,49 juta atau 28,78% pekerja berada pada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Angka ini tidak berarti sektor pertanian identik dengan produktivitas rendah, tetapi menunjukkan besarnya populasi yang kesejahteraannya bergantung pada produktivitas sektor primer, ukuran lahan, volatilitas harga, iklim, dan akses rantai nilai. Dengan demikian, indikator kerja perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan dan produktivitas.

Pada sisi kapabilitas, konversi lebih konsisten. IPM meningkat dari 71,92 pada 2019 menjadi 75,90 pada 2025 atau hampir empat poin dalam enam tahun. Seluruh komponen utama 2025—umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita—menunjukkan perbaikan. Ini memperkuat argumentasi bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya menghasilkan ekspansi output, tetapi juga peningkatan kapabilitas. Tantangannya adalah memastikan bahwa kapabilitas tersebut dapat digunakan dalam pekerjaan dan usaha dengan produktivitas yang tinggi.

Tabel 3. Dashboard Kesejahteraan Kontemporer Indonesia

Indikator terbaru	Nilai	Interpretasi diagnostik
Pertumbuhan ekonomi Q2-2026	5,29% y/y	Kapasitas produksi tetap tumbuh solid
Pertumbuhan semester I-2026	5,45% c-to-c	Momentum pertumbuhan terjaga
Kemiskinan Mar-2026	8,07% / 22,93 juta	Menurun dari Sep-2025; konversi positif
Kemiskinan perdesaan / perkotaan	10,67% / 6,34%	Gap 4,33 pp; konversi spasial belum merata
Gini ratio Mar-2026	0,368	Naik dari 0,363 (Sep-2025); sinyal distribusi campuran
TPT Feb-2026	4,68%	Menurun 0,08 pp y/y; pasar kerja membaik

Pekerja pertanian Feb-2026	42,49 juta / 28,78%	Basis kerja besar; produktivitas sangat heterogen
IPM 2025	75,90	Kapabilitas meningkat; +3,98 poin dari 2019
UHH / HLS / RLS 2025	74,47 / 13,30 / 9,07 tahun	Dimensi kesehatan dan pendidikan membaik

Ekonomi kerakyatan memiliki skala yang sangat besar dalam struktur tersebut. Lebih dari 64 juta unit UMKM, kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB, dan penyerapan hampir 97% tenaga kerja menempatkan usaha rakyat bukan sebagai sektor pinggiran, melainkan sebagai pusat transmisi kesejahteraan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Namun indikator makro tersebut belum membedakan usaha produktif berdaya saing dengan usaha subsisten. Karena itu, jumlah UMKM harus dibaca sebagai capacity base, sementara peningkatan kesejahteraan bergantung pada produktivitas, scale-up, formalitas, teknologi, akses pasar, dan pembiayaan.

Perbankan syariah menunjukkan kapasitas yang makin besar untuk mendukung basis usaha tersebut. Per Maret 2026, sekitar Rp217,86 triliun pembiayaan disalurkan kepada UMKM. Rasio ini setara sekitar 30,4% dari total pembiayaan perbankan syariah Rp716,40 triliun. Angka tersebut menunjukkan hubungan material antara sektor syariah dan ekonomi rakyat. Namun SNLIK 2025 menunjukkan inklusi keuangan syariah hanya 13,41%, berarti penggunaan layanan syariah masih jauh lebih sempit dibanding skala populasi dan usaha yang potensial. Gap antara pertumbuhan industri dan penggunaan masyarakat menjadi salah satu titik penting welfare conversion gap pada sisi akses keuangan.

Islamic social finance juga berkembang, tetapi potensi produktif belum sepenuhnya terkonversi. Wakaf uang meningkat tajam dari Rp819 miliar pada 2020 menjadi Rp3,015 triliun pada 2025, tetapi akumulasinya tidak bertambah antara 2024 dan 2025 menurut dashboard BWI. Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf untuk ekonomi baru 4,8%. Ini menunjukkan dua pesan sekaligus: mobilisasi dana sosial mempunyai momentum tinggi, tetapi tantangan berikutnya adalah tata kelola, desain instrumen produktif, pipeline proyek, transparansi outcome, dan kemampuan menghubungkan aset wakaf dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Tabel 4. Ekonomi Rakyat dan Ekosistem Ekonomi Syariah

Komponen ekonomi rakyat/syariah	Indikator terbaru	Makna untuk kesejahteraan
Skala UMKM	>64 juta unit; >60% PDB; hampir 97% tenaga kerja	Basis partisipasi ekonomi rakyat sangat besar
Aset perbankan syariah Mar-2026	Rp1.061,61 triliun	Kapasitas lembaga meningkat
Pembiayaan syariah Mar-2026	Rp716,40 triliun	Intermediasi ke sektor riil
Pembiayaan UMKM syariah	Rp217,86 triliun (~30,4% total pembiayaan)	Keterhubungan dengan usaha rakyat sudah material
Literasi syariah 2025	43,42%	Pemahaman tumbuh tetapi belum universal
Inklusi syariah 2025	13,41%	Jauh di bawah inklusi umum 80,51%; access-use gap besar
Wakaf uang 2020→2025	Rp0,819 T → Rp3,015 T	Mobilisasi cepat; CAGR sekitar 29,8%
Pemanfaatan tanah wakaf untuk ekonomi	4,8%	Potensi produktif masih kecil
Dampak zakat 2025	302.994 jiwa keluar dari	Indikasi peran

(estimasi BAZNAS)	garis kemiskinan	redistributif/pemberdayaan; perlu evaluasi independen
-------------------	------------------	---



Gambar 2. Perkembangan Wakaf Uang Nasional, 2020–2025
Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2026), diolah.

Zakat memberikan kanal redistribusi yang lebih langsung. BAZNAS melaporkan bahwa pengelolaan zakat nasional 2025 membantu 302.994 jiwa melewati garis kemiskinan berdasarkan pengukuran Kaji Dampak Zakat. Temuan ini relevan sebagai bukti institusional bahwa zakat dapat memiliki outcome ekonomi, tetapi tidak dapat langsung dibandingkan dengan perubahan kemiskinan BPS sebagai efek kausal nasional. Data BAZNAS menggunakan metodologi program dan kelompok penerima tertentu; karenanya penelitian ini menempatkannya sebagai evidence of potential, bukan sebagai atribusi makro tunggal.

Ketika seluruh dimensi dibaca bersama, WCG-D menghasilkan diagnosis “konversi ada, tetapi belum lengkap”. Kanal penurunan kemiskinan dan kapabilitas manusia menunjukkan arah yang kuat. Kanal pekerjaan menunjukkan perbaikan, tetapi kualitas dan struktur produktivitas masih penting. Kanal distribusi dan spasial bersifat parsial karena Gini meningkat tipis pada Maret 2026 dan kesenjangan kemiskinan perdesaan-perkotaan masih lebar. Kanal partisipasi keuangan juga parsial: UMKM dan aset keuangan syariah berukuran besar, tetapi inklusi syariah tetap rendah. Diagnosis ini memberi dasar yang lebih operasional daripada sekadar menyatakan “pertumbuhan belum merata”.

Tabel 5. Welfare Conversion Gap Diagnostic (WCG-D)

Kanal WCG-D	Bukti utama	Diagnosis	Implikasi
Poverty transmission	Kemiskinan Sep-2025 8,25% → Mar-2026 8,07%	KUAT/POSITIF	Pertumbuhan beriringan dengan penurunan kemiskinan pada horizon pendek
Distribution	Gini Sep-2025 0,363 → Mar-2026 0,368	PARSIAL	Perbaikan kemiskinan tidak otomatis memperkecil ketimpangan
Spatial equity	Kemiskinan rural 10,67% vs urban 6,34%	PARSIAL	Diperlukan produktivitas dan akses pasar perdesaan

Employment conversion	TPT Feb-2026 4,68%; 28,78% pekerja di pertanian	PARSIAL-POSITIF	Penyerapan kerja baik; kualitas dan produktivitas tetap krusial
Human capability	IPM 2019 71,92 → 2025 75,90	KUAT/POSITIF	Kapabilitas meningkat secara konsisten
Productive/financial participation	UMKM dominan; inklusi syariah baru 13,41%	PARSIAL	Skala usaha rakyat besar tetapi akses produk syariah belum luas
Kesimpulan diagnostik	Kemajuan pada poverty & capability, tekanan pada distribution/spatial/access	KONVERSI ADA, BELUM LENGKAP	Fokus kebijakan pada produktivitas rakyat, distribusi, dan inclusion-to-use

Pembahasan

Ekonomi Kerakyatan sebagai Kanal Konversi Pertumbuhan

Temuan WCG-D menunjukkan bahwa persoalan pembangunan bukan pilihan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan diperlukan untuk menyediakan surplus ekonomi, ruang fiskal, investasi, dan permintaan. Pertanyaan kebijakan adalah bagaimana surplus tersebut memasuki rumah tangga melalui pekerjaan produktif, usaha, kepemilikan aset, dan layanan dasar. Ekonomi kerakyatan dapat berfungsi sebagai transmission mechanism karena mendekatkan aktivitas produksi dan kepemilikan kepada rumah tangga. Dalam kerangka ini, ekonomi kerakyatan bukan sinonim bantuan sosial, dan bukan pula sekadar mempertahankan usaha mikro apa adanya.

Balisacan et al. (2003) menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan di tingkat daerah dan kondisi awal yang berbeda. Miranti (2010) serta Miranti et al. (2014) menambahkan pentingnya perubahan ketimpangan dalam menentukan seberapa besar pertumbuhan mengurangi kemiskinan. Implikasinya, kebijakan UMKM harus berorientasi pada “quality of participation”. Kredit murah tanpa akses pasar dapat menambah utang tanpa produktivitas; digitalisasi tanpa kemampuan bisnis dapat menambah kanal pemasaran tetapi tidak memperbaiki margin; legalisasi tanpa pendampingan dapat menambah biaya administrasi. Sebaliknya, intervensi terintegrasi—kapabilitas, teknologi, pembiayaan, pasar, dan perlindungan risiko—lebih mungkin mengubah pertumbuhan agregat menjadi pendapatan rumah tangga.

Dimensi spasial memperkuat argumen tersebut. Kemiskinan perdesaan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa strategi ekonomi rakyat perlu memprioritaskan rantai nilai pertanian, agroindustri, konektivitas logistik, koperasi produsen, dan diversifikasi pendapatan desa. Ini juga menunjukkan mengapa indikator penyerapan tenaga kerja saja tidak cukup. Sebuah kebijakan dapat berhasil menciptakan pekerjaan tetapi gagal meningkatkan kesejahteraan apabila pekerjaan tersebut berproduktivitas rendah, tidak stabil, atau tidak memiliki perlindungan sosial. Welfare conversion memerlukan peningkatan produktivitas tenaga kerja, bukan hanya peningkatan jumlah orang yang “bekerja”.

Ekonomi Syariah: dari Pertumbuhan Industri menuju Inklusi Produktif

Implikasi bagi ekonomi syariah adalah kebutuhan menggeser fokus dari ukuran industri menuju kualitas intermediasi. Aset perbankan syariah Rp1.061,61 triliun menunjukkan skala institusi yang makin besar, tetapi welfare relevance ditentukan oleh siapa yang menggunakan pembiayaan, untuk aktivitas apa, dengan struktur risiko seperti apa, dan apakah pembiayaan memperbesar aset produktif rumah tangga. Pembiayaan UMKM Rp217,86 triliun merupakan titik awal yang kuat, tetapi masih perlu dibedakan antara sektor perdagangan jangka pendek, investasi produktif, usaha mikro, usaha kecil, dan rantai nilai halal.

Kesenjangan paling jelas berada pada inklusi. Indeks inklusi keuangan syariah 13,41% hanya sekitar seperenam dari indeks inklusi keuangan umum 80,51%. Gap 67,1 poin persentase menunjukkan bahwa pertumbuhan lembaga dan peningkatan literasi belum diterjemahkan menjadi penggunaan secara luas. Karena itu, agenda syariah yang berorientasi ekonomi kerakyatan perlu menurunkan biaya akses, meningkatkan distribusi digital dan fisik, memperkuat produk sederhana bagi UMKM, dan menghubungkan pembiayaan dengan pendampingan usaha. Inklusi tidak boleh berhenti pada pembukaan rekening; indikator yang lebih bermakna adalah penggunaan berulang untuk tabungan, transaksi, perlindungan, dan investasi/pembiayaan produktif.

Secara maqashid, pengembangan tersebut harus mempertahankan substansi keadilan. Dusuki dan Abdullah (2007) mengingatkan bahwa maqashid tidak seharusnya menjadi legitimasi generik untuk setiap inovasi. Produk pembiayaan yang disebut syariah tetap perlu dinilai dari transparansi, distribusi risiko, keterjangkauan, dan dampak terhadap pelaku usaha. Mergaliyev et al. (2021) menunjukkan bahwa objective-based assessment dapat memperkaya pengukuran kinerja bank Islam. Dalam konteks penelitian ini, ukuran keberhasilan perbankan syariah sebaiknya menggabungkan indikator prudensial dengan indikator kontribusi sektor riil dan akses kelompok produktif.

Zakat dan Wakaf: Redistribusi, Graduation, dan Pembentukan Aset

Zakat dan wakaf memiliki posisi berbeda tetapi komplementer. Zakat berfungsi kuat pada redistribusi dan dapat dikembangkan menuju graduation strategy, yaitu membantu mustahik beralih dari kondisi rentan menuju kemandirian ekonomi melalui kombinasi bantuan dasar, modal produktif, pelatihan, dan akses pasar. Wakaf lebih cocok untuk pembentukan aset sosial jangka panjang: fasilitas pendidikan, kesehatan, lahan produktif, pembiayaan mikro berbiaya rendah, atau infrastruktur ekonomi masyarakat. Menggabungkan keduanya secara mekanis justru berisiko mengaburkan karakter hukum dan tujuan masing-masing.

Pertumbuhan wakaf uang hampir 30% per tahun pada 2020–2025 menunjukkan kapasitas mobilisasi, tetapi stagnasi angka 2024–2025 menandakan pentingnya memperkuat proposisi nilai bagi wakif dan kualitas proyek. Pemanfaatan tanah wakaf untuk ekonomi hanya 4,8% menunjukkan ruang besar untuk productive waqf. Hapsari et al. (2026) memberikan contoh bagaimana dampak wakaf produktif pada usaha mikro dapat diuji secara kuantitatif. Literatur semacam ini penting agar klaim “wakaf meningkatkan kesejahteraan” tidak berhenti pada teori, tetapi diukur melalui pendapatan, aset, keberlangsungan usaha, dan perubahan kapasitas penerima.

Dalam IPEWF, Islamic social finance berfungsi sebagai jembatan bagi kelompok yang belum bankable. Zakat dapat mengurangi deprivation dan membangun kapabilitas awal; wakaf dapat menyediakan aset/infrastruktur; qard hasan dapat menyediakan pembiayaan transisi; setelah usaha menguat, pembiayaan komersial syariah dapat mengambil peran lebih besar. Ini adalah continuum of finance, bukan substitusi satu instrumen terhadap instrumen lain. Kebijakan yang berhasil perlu mempunyai mekanisme rujukan antarlembaga agar penerima tidak terjebak permanen pada bantuan.

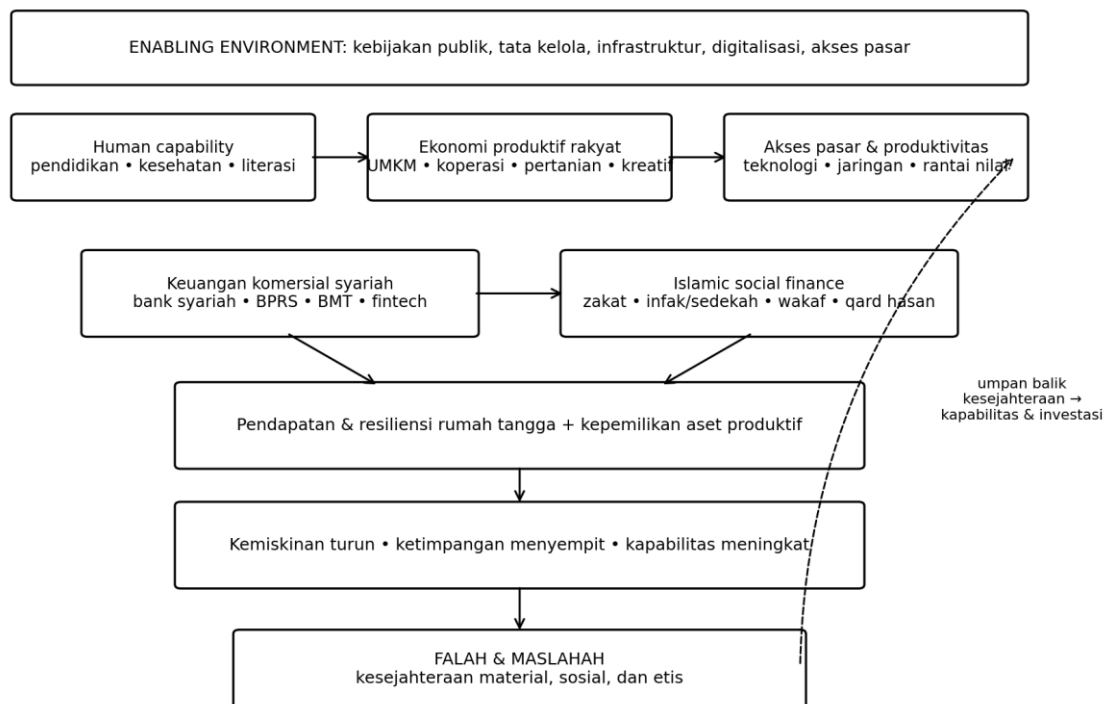
Islamic People's Economy Welfare Framework (IPEWF)

IPEWF dirumuskan sebagai kerangka ekosistem, bukan rantai kausal linear. Pada lapisan pertama terdapat enabling environment berupa kebijakan publik, tata kelola, infrastruktur, digitalisasi, perlindungan konsumen, dan akses pasar. Lapisan kedua adalah human capability—pendidikan, kesehatan, literasi, dan kewirausahaan—yang menentukan kemampuan masyarakat menggunakan kesempatan ekonomi. Lapisan ketiga adalah people's productive economy yang menjadi ruang pembentukan pendapatan dan aset. Lapisan keempat terdiri atas dua kanal finansial: keuangan komersial syariah dan Islamic social finance. Kedua kanal bertemu pada produktivitas, resiliensi rumah tangga, serta pembentukan aset.

Kerangka ini memiliki feedback loop. Rumah tangga yang memperoleh pendapatan lebih stabil dapat meningkatkan pendidikan, kesehatan, tabungan, dan investasi usaha, yang pada gilirannya memperkuat kapabilitas. Sebaliknya, guncangan kesehatan, iklim, atau kehilangan kerja dapat menurunkan kapabilitas dan mengembalikan rumah tangga pada kerentanan. Karena itu, falah dan masalah diperlakukan sebagai outcome dinamis, bukan titik akhir permanen. Pendekatan ini lebih sesuai dengan teori kapabilitas Sen (1999) dan visi pembangunan Islam Chapra (2008) daripada model satu arah yang mengasumsikan bahwa pembiayaan selalu otomatis menghasilkan kesejahteraan.

Kerangka IPEWF juga menjelaskan hubungan antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah tanpa menyamakan keduanya. Ekonomi kerakyatan menjawab siapa basis pelakunya dan bagaimana partisipasi produktif disebarkan. Ekonomi syariah memberikan prinsip transaksi, kanal pembiayaan, dan instrumen sosial. Keduanya bertemu pada tujuan pemberdayaan, keadilan, dan keberlanjutan. Konsekuensinya, pengembangan ekonomi syariah akan lebih substantif apabila keberhasilannya diukur bukan hanya dari aset industri, tetapi juga dari perluasan penggunaan, produktivitas UMKM, graduation mustahik, pemanfaatan wakaf produktif, dan outcome kapabilitas.

Islamic People's Economy Welfare Framework (IPEWF)



Gambar 3. Islamic People's Economy Welfare Framework (IPEWF)

Sumber: Dikembangkan penulis berdasarkan Sen (1999), Chapra (2008), Dusuki dan Abdullah (2007), serta sintesis temuan penelitian.

Implikasi Kebijakan: dari Sektoral menuju Ekosistem Konversi

Pertama, kebijakan UMKM perlu menggeser orientasi dari jumlah penerima program menuju produktivitas dan graduation. Basis data terpadu harus memungkinkan pemetaan tahap usaha, kebutuhan teknologi, akses pasar, histori pembiayaan, dan risiko. Program pembiayaan perlu dikaitkan dengan pendampingan dan indikator outcome seperti kenaikan omzet riil, produktivitas tenaga kerja, formalitas, dan survival rate. Dengan cara ini, ekonomi kerakyatan menjadi strategi transformasi produktif, bukan sekadar strategi distribusi bantuan.

Kedua, perbankan syariah perlu memperbesar kualitas pembiayaan UMKM dengan pendekatan value-chain financing. Bank dapat bekerja dengan koperasi, agregator, offtaker, pesantren, BUMDes, dan platform digital untuk menurunkan biaya informasi dan risiko. Target tidak hanya volume pembiayaan, tetapi juga jumlah pelaku yang naik kelas, share pembiayaan investasi, dan proporsi pelaku baru yang berhasil masuk ke layanan formal. OJK dapat mendorong pelaporan outcome inclusion-to-use agar industri tidak hanya mengukur rekening atau outstanding.

Ketiga, integrasi Islamic social finance perlu didesain sebagai jalur pemberdayaan. BAZNAS, LAZ, nadzir wakaf, BWI, BPRS/BMT, dan bank syariah dapat membentuk protokol referral berbasis asesmen. Rumah tangga sangat rentan menerima perlindungan dan zakat konsumtif; penerima yang siap usaha memperoleh zakat produktif/qard hasan; usaha yang berkembang memperoleh pembiayaan mikro komersial; sedangkan wakaf produktif menyediakan infrastruktur atau aset bersama. Jalur ini membutuhkan indikator graduation dan safeguard agar dana sosial tidak menggantikan kewajiban negara atau menjadi subsidi permanen bagi bisnis yang tidak layak.

Keempat, ketimpangan spasial menuntut desain wilayah. Gap kemiskinan perdesaan-perkotaan 4,33 poin persentase menunjukkan perlunya mengarahkan ekosistem syariah pada sentra pertanian, perikanan, pesantren, dan industri rumah tangga di daerah. Produk syariah dapat dihubungkan dengan gudang, cold chain, sertifikasi halal, pasar digital, dan perlindungan risiko. Tanpa sisi pasar dan logistik, tambahan pembiayaan berpotensi hanya memperbesar modal kerja sementara tanpa meningkatkan nilai tambah.

Kelima, pemerintah perlu membangun dashboard welfare conversion yang menghubungkan indikator makro dengan outcome masyarakat. Pertumbuhan, kemiskinan, Gini, IPM, TPT, pembiayaan UMKM, literasi/inklusi syariah, zakat produktif, dan wakaf produktif dapat dipantau sebagai satu dashboard tanpa memaksanya menjadi indeks tunggal. WCG-D dalam penelitian ini merupakan prototipe konseptual untuk arah tersebut. Keunggulan dashboard adalah menjaga transparansi trade-off: suatu periode dapat memiliki pertumbuhan tinggi tetapi distribusi melemah, dan kebijakan dapat diarahkan pada kanal yang tertinggal.

Kontribusi Teoretis dan Batas Inferensi

Secara teoretis, penelitian memberikan tiga kontribusi. Pertama, konsep welfare conversion gap dioperasionalkan sebagai diagnostic dashboard, sehingga tidak berhenti pada frasa normatif “pertumbuhan belum merata”. Kedua, ekonomi kerakyatan ditempatkan sebagai mekanisme partisipasi produktif, bukan hanya kategori usaha kecil. Ketiga, IPEWF menghubungkan ekonomi produktif rakyat dengan keuangan komersial syariah dan Islamic social finance dalam satu kerangka ekosistem yang memiliki feedback loop.

Namun batas inferensi harus dijaga. WCG-D tidak membuktikan bahwa perubahan Gini disebabkan oleh pertumbuhan tertentu, atau bahwa pembiayaan syariah menyebabkan penurunan kemiskinan nasional. IPEWF juga belum diuji dengan structural equation, panel data, atau evaluasi program. Karena itu, hasil penelitian bersifat deskriptif-diagnostik dan theory-building. Penelitian lanjutan dapat menguji elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan menurut provinsi, hubungan pembiayaan UMKM syariah dengan survival usaha, serta dampak zakat/wakaf produktif menggunakan desain kuasi-eksperimental.

SIMPULAN

Menjelang 81 tahun kemerdekaan, Indonesia telah mencatat kemajuan kesejahteraan yang substansial, tetapi proses konversi pertumbuhan menjadi kesejahteraan belum selesai. Benchmark BPS menunjukkan penurunan besar kemiskinan dalam jangka panjang dan pemulihan kembali setelah krisis maupun pandemi. Pada periode terkini, ekonomi semester I-2026 tumbuh 5,45% dan kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07%. IPM 2025 mencapai 75,90, menunjukkan kemajuan kapabilitas. Namun, Gini ratio naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368

pada Maret 2026 dan kemiskinan perdesaan masih 4,33 poin persentase lebih tinggi daripada perkotaan. Temuan ini mengonfirmasi adanya welfare conversion gap yang bersifat parsial, bukan kegagalan pertumbuhan secara keseluruhan.

WCG-D menunjukkan kanal kemiskinan dan kapabilitas bekerja relatif kuat, sedangkan distribusi, spasial, kualitas pekerjaan, dan partisipasi finansial masih membutuhkan penguatan. UMKM membentuk basis ekonomi rakyat dengan lebih dari 64 juta unit dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar, tetapi skala tersebut belum otomatis berarti produktivitas tinggi. Kebijakan ekonomi kerakyatan karena itu perlu mengutamakan produktivitas, teknologi, akses pasar, kualitas pekerjaan, pembentukan aset, dan graduation usaha.

Bagi ekonomi syariah, implikasi utama adalah menggeser ukuran keberhasilan dari pertumbuhan institusi menuju inclusion-to-use dan outcome sektor riil. Perbankan syariah telah menyalurkan Rp217,86 triliun pembiayaan UMKM per Maret 2026, tetapi inklusi keuangan syariah baru 13,41%. Wakaf uang tumbuh cepat hingga Rp3,015 triliun, sementara pemanfaatan tanah wakaf untuk ekonomi baru 4,8%. Zakat menunjukkan potensi redistributif berdasarkan pengukuran BAZNAS. Kesenjangan antara kapasitas dana dan penggunaan produktif inilah yang perlu menjadi agenda pengembangan berikutnya.

Penelitian mengusulkan Islamic People's Economy Welfare Framework (IPEWF) sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan enabling environment, kapabilitas manusia, ekonomi produktif rakyat, keuangan komersial syariah, Islamic social finance, akses pasar, pendapatan/resiliensi, serta outcome kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan manusia menuju falah dan maslahah. Kerangka ini tidak diklaim sebagai model kausal yang telah diuji. Nilainya terletak pada kemampuan menyatukan instrumen yang selama ini dianalisis secara sektoral ke dalam satu logika konversi kesejahteraan.

Keterbatasan penelitian berasal dari ketidakseragaman seri statistik selama delapan dekade, perubahan metode pengukuran kemiskinan dan IPM, serta keterbatasan data historis ekonomi syariah. Penelitian lanjutan perlu menguji WCG-D dengan panel provinsi, membangun indikator produktivitas UMKM yang lebih konsisten, serta mengevaluasi dampak pembiayaan syariah, zakat produktif, dan wakaf produktif dengan desain kausal. Dengan pengembangan tersebut, evaluasi pembangunan dapat bergerak dari pertanyaan “berapa ekonomi tumbuh” menuju “seberapa efektif pertumbuhan memperluas kemampuan masyarakat hidup produktif, aman, dan bermartabat.”

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. (2026). Kinerja pengelolaan zakat meningkat, BAZNAS berhasil tekan angka kemiskinan di Indonesia. BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin dan garis kemiskinan, 1970–2017. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Persentase penduduk miskin September 2019 turun menjadi 9,22 persen. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase penduduk miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026a). Ekonomi Indonesia Triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen (y-on-y). BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026b). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026c). Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026d). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026e). Indeks Pembangunan Manusia 2025. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026f). Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. BPS.

- Badan Pusat Statistik. (2026g). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2026h). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen; rata-rata upah buruh sebesar Rp3,29 juta. BPS.
- Badan Wakaf Indonesia. (2026). Data Wakaf Indonesia. BWI SuperApps.
- Balisacan, A. M., Pernia, E. M., & Asra, A. (2003). Revisiting growth and poverty reduction in Indonesia: What do subnational data show? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(3), 329–351. <https://doi.org/10.1080/0007491032000142782>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST model as measurement of poverty and welfare indices from Islamic perspective. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 87–104.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.
- De Silva, I., & Sumarto, S. (2014). Does economic growth really benefit the poor? Income distribution dynamics and pro-poor growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 227–242. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938405>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>
- Hapsari, M. I., Herianingrum, S., Fauzi, R. M. Q., Salma, J. R., Adam, M. R., Arifin, S. R., & Siti, S. N. (2026). Does productive waqf improve the welfare of micro-enterprises? Evidence from a PSM–DID model in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–16. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2024-0261>
- Hill, H. (2020). Indonesian living standards over 50 years: A multidimensional analysis. *Asian Economic Journal*, 34(3), 249–274. <https://doi.org/10.1111/asej.12221>
- Hill, H. (2021). What's happened to poverty and inequality in Indonesia over half a century? *Asian Development Review*, 38(1), 68–97. https://doi.org/10.1162/adev_a_00158
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Pemerintah dorong UMKM naik kelas, tingkatkan kontribusi terhadap ekspor Indonesia.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari'ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Miranti, R. (2010). Poverty in Indonesia 1984–2002: The impact of growth and changes in inequality. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 46(1), 79–97. <https://doi.org/10.1080/00074911003642252>
- Miranti, R., Duncan, A., & Cassells, R. (2014). Revisiting the impact of consumption growth and inequality on poverty in Indonesia during decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(3), 461–482. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.980377>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Industri perbankan syariah tumbuh solid berkelanjutan. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.